

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Diperlukannya monitoring pelaksanaan pekerjaan masing-masing individu dan unit kerja oleh pimpinan	Terpantaunya pelaksanaan pekerjaan di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Adanya pelaporan individu sampai dengan es.IV dan unit kerja kepada pimpinan	Monitoring pelaksanaan tugas di lingkup D21 (Area Penguatan Pengawasan) Akuntabilitas	Tersusunnya laporan dua mingguan individu dan subdit serta laporan bulanan direktorat	Januari - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Penyusunan laporan dua mingguan individu	Setiap dua minggu per bulan	Laporan dua mingguan individu
								2	Penyusunan laporan dua mingguan Subdirektorat	Setiap dua minggu per bulan	Laporan dua mingguan Subdirektorat
								3	Penyusunan laporan bulanan Direktorat	Tiap bulan	Laporan bulanan
2	Belum semua pegawai paham mengenai Reformasi Birokrasi	Pemahaman tentang RB oleh seluruh pegawai di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Tersosialisasinya RB kepada seluruh pegawai Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Internalisasi Reformasi Birokrasi (Manajemen Perubahan)	Memahami Reformasi Birokrasi di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Juni - Juli	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Membuat undangan internalisasi RB dengan mengundang BPOT	Juni	Undangan
								2	Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Internal Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Juni	Notulensi
								3	Internal Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan memahami Reformasi Birokrasi	Juli	Formulir pernyataan memahami Reformasi Birokrasi
3	Belum semua kegiatan memiliki panduan dalam pelaksanaan pekerjaan	Terdapat SOP yang berisi urutan proses dalam melakukan pekerjaan	Tersusunnya SOP di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Perencanaan dan Monev PBJP (Area Penataan Tata Laksana)	Tersusunnya SOP sesuai kebutuhan	Juni - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Identifikasi SOP yang dibutuhkan	Juni	List kebutuhan SOP
								2	Penyusunan SOP	Juli - September	Draft SOP
								3	Penyampaian draft SOP ke Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Juli - Oktober	Nota Dinas
4	Belum tercatatnya dengan baik penerimaan konsultasi yang dilayani	Memperbaiki catatan atau rekap konsultasi yang dilayani	Meningkatnya layanan Helpdesk SIRUP dan Monev	Peningkatan Layanan Helpdesk SIRUP dan Monev (Area Peningkatan Pelayanan Publik)	Terbangunnya Sistem Helpdesk SIRUP dan Monev	April - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Penyampaian permohonan penggunaan Sistem Informasi Helpdesk kepada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik selaku pengembang	April	Nota Dinas
								2	Rapat Koordinasi Awal	Mei	Notulensi
								3	Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem	Juni	Notulensi
								4	Uji coba sistem	Agustus	Laporan uji coba sistem
								5	Implementasi sistem	September - Desember	Laporan implementasi sistem
5	RUP LKPP per UKE II belum terumumkan 100% dari belanjanya	Perbaikan pada setiap UKE II terkait dengan pengisian RUP LKPP TA 2019	Memperbaiki proses perencanaan pengadaan di lingkup LKPP	Evaluasi Proses Pengumuman RUP dalam lingkup LKPP Setiap Triwulan (Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja)	Pengumuman RUP LKPP yang 100%	Januari - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi)	1	- Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan I - Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP	Januari - Maret	RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK
								2	- Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan II - Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP	April - Juni	RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
**Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan**

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
								3	- Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan III - Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP	Juli - September	RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK
								4	- Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan IV - Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP	Oktober - Desember	RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK
6	Perlunya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan berdasarkan 12 (dua belas) perubahan pengaturan dan 19 (sembilan belas) pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya (Peraturan LKPP)	Terpantaunya perkembangan, pencapaian dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan PBJP	Terlaksananya pengukuran monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan 12 (dua belas) perubahan pengaturan dan 19 (sembilan belas) pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya (Peraturan LKPP)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PBJP (Area Penguatan Peraturan Perundang-Undangan)	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PBJP	Januari - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan)	1	Rapat Pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat/Biro terkait	Mei	Notulensi, undangan, telaahan & file rancangan kuesioner
								2	Penyusunan dan Finalisasi Kuesioner	Mei - Juni	Kuesioner cetak & web
								3	Finalisasi Penentuan Lokus Survei dan koordinasi Enumerator internal LKPP	Juli - Agustus	Notulensi & Undangan
								4	Pelaksanaan Survei	Agustus - September	Laporan Pelaksanaan
								5	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	September - November	Laporan
7	Perlunya Pemantauan terhadap Indikator Kinerja LKPP T.A. 2019 untuk membandingkan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis LKPP 2015-2019	Terpantaunya Indeks Indikator Kinerja LKPP T. A. 2019	Terlaksananya Pengukuran Indikator Kinerja LKPP TA.2019	Pengukuran Indikator Kinerja LKPP TA.2019 (Area Akuntabilitas Kinerja)	Tersusunnya laporan Indikator Kinerja LKPP T. A. 2019	Januari - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan)	1	Rapat pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat/Biro terkait	Maret	Notulensi & Undangan
								2	Finalisasi Penentuan Lokus Survei dan koordinasi Enumerator internal LKPP	Maret	Laporan
								3	Pelaksanaan survei: - Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Pedoman Pengadaan di Bidang Khusus - Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ - Persepsi Stakeholder terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ	April - Agustus	Laporan Pelaksanaan
								4	Pengolahan dan Penyusunan Laporan	September - November	Laporan
8	Perlunya rekomendasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan dalam proses pelaksanaan PBJP	tersedianya rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengadaan	Tersusunnya laporan rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengadaan	Penyusunan Policy Brief (Area Penguatan Peraturan Perundang-Undangan)	Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan	Mei - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan)	1	Rapat usulan Policy Brief	Mei	Notulensi & draf usulan
								2	Reviu Policy Brief	Mei	Notulensi & draf Policy Brief
								3	Pemaparan Policy Brief	Juni - Juli	Notulensi & draf Policy Brief
								4	Penyusunan Laporan	Oktober - Desember	Laporan

MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019  
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
9	Belum adanya monitoring pengadaan secara komprehensif	tersedianya aplikasi monitoring pengadaan sampai dengan pembayaran di LKPP	terintegrasi aplikasi monitoring pengadaan di LKPP dengan aplikasi keuangan pusat	Pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan PBJP di LKPP (Area Akuntabilitas Kinerja)	Implementasi Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP	Juni - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Pengadaan)	1	Rapat koordinasi dengan BUK	Juni	Nctulensi rapat
								2	Melakukan validasi data pengadaan LKPP	Juni-Juli	Hasil validasi
								3	Melakukan integrasi dengan OMSPAN melalui <i>web service</i>	November	AMEL yang terintegrasi dengan OMSPAN
10	Belum dipahaminya aturan baru terkait sanksi daftar hitam dalam PBJP	Pemahaman terkait aturan baru dan terpantaunya implementasi aturan baru tersebut oleh KLPD	Tersosialisasinya aturan baru kepada KLPD dan terpantaunya implementasi aturan baru tersebut oleh KLPD	Monitoring dan layanan penayangan/penurunan sanksi daftar hitam (Area Peningkatan Pelayanan Publik)	Terpantaunya penayangan/penurunan sanksi daftar hitam berdasarkan Perlem 17/2018	Januari - Desember	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Pengadaan)	1	Monitoring hasil laporan tiap bulan	Bulanan	Laporan monitoring daftar hitam setiap bulan
								2	Diseminasi daftar hitam	Maret - April	Laporan hasil diseminasi
								3	Rapat pengembangan aplikasi inaproc (Daftar Hitam)	April, TW3 dan TW4	Nctulensi dan pengembangan aplikasi

Jakarta, 14 Juli 2019

Mengetahui

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi



Sarah Sadiqa

Menyetujui

Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan



Sutan S. Lubis